

# PEREMPUAN DALAM KEPEMIMPINAN POLITIK STUDI KASUS TENTANG SIKAP MASYARAKAT TERHADAP KEPALA DESA PEREMPUAN DI KABUPATEN MALANG

Oleh :  
Budhy Prianto<sup>1</sup>

**Abstrak :** Penelitian ini mencoba mencari jawaban atas permasalahan bagaimana sikap masyarakat desa % yang kepala desanya perempuan % terhadap kepala desa perempuan, dan faktor apa saja yang berpengaruh terhadap terbentuknya masyarakat desa tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif sekaligus eksplanatori dengan pendekatan survei. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sikap masyarakat desa pada umumnya mendukung kepemimpinan kepala desa perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh fakta, bahwa sebesar 68,75 % responden memberikan dukungan kepada kepala desa pada saat pemilihan kepala desa yang lalu; 89,06 % responden memberikan dukungan pada kepemimpinan kepala desa pada saat sekarang; dan sebesar 48,44 % responden juga akan memberikan dukungan pada periode yang akan datang apabila kepala desa mencalonkan diri lagi sebagai kepala desa pada pemilihan berikutnya. Sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terbentuknya sikap tersebut terdapat 7 faktor, yaitu (1) kemampuan kepala desa; (2) tokoh panutan; (3) imbalan/*money politics*; (4) akses media massa; (5) pendidikan; (6) agama; dan (7) budaya masyarakat. Secara keseluruhan ke-7 faktor tersebut berpengaruh kuat terhadap variabel Y (sikap masyarakat) dengan koefisien korelasi berganda sebesar 0,752. Hanya saja untuk masing-masing faktor pengaruhnya sangat beragam. Dengan uji korelasi parsial diketahui : pengaruh X1 sebesar 0,566 (kuat), X2 sebesar 0,354 (lemah), X3 sebesar 0,208 (lemah), X4 sebesar -0,437 (lemah dan negatif), X5 sebesar 0,083 (sangat lemah), X6 sebesar -0,320 (lemah dan negatif), dan X7 sebesar -0,152 (sangat lemah dan negatif) terhadap variabel Y.

**Kata Kunci :** Patron, perilaku, dukungan, pemilihan, preferensi

## PENDAHULUAN

Barangkali telah menjadi terlalu klasik dan klise manakala mempersoalkan peran politik perempuan dengan argumentasi bahwa jumlah perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Tetapi pada kenyataannya hal demikian tidak dapat dihindari. Sudah tidak terhitung ahli maupun laporan penelitian yang mengatakan demikian. Hal pokok yang dipersoalkan ialah; mengapa jumlah perempuan yang terlibat aktif dalam

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap Fisip Unmer Malang

politik hanya kecil saja dibandingkan laki-laki. Asfar (1996:4) misalnya, mengemukakan, bahwa dari 1000 anggota DPR/MPR periode 1987-1992 anggota yang berjenis kelamin perempuan hanya 150 orang atau 15 %, dan fenomena ini juga terjadi di lingkungan baik DPRD Propinsi maupun DPRD Kota/Kabupaten. Demikian juga Kompas (6 Maret 2001) mengemukakan, bahwa konstituen perempuan yang berjumlah lebih dari 50 % dalam pemilihan umum 1999, hanya terwakili sekitar 9 % perempuan dalam kursi lembaga legislatif. Kompas (27 Januari 2002) melaporkan data yang lebih baru, selain bahwa jumlah perempuan di MPR/DPR saat ini hanya 8,9 % dari 700 orang anggotanya, juga tidak satu pun dari 32 gubernur yang berjenis kelamin perempuan.

Politik dan pemerintahan tingkat desa juga memperlihatkan fenomena yang kurang lebih sama. Di Kabupaten Malang, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang (1999:32-36) jumlah perempuan berusia 20 tahun ke atas sebanyak 668.934 orang dan penduduk laki-laki berusia sama 624.991 orang. Jumlah penduduk perempuan lebih besar 7 % dibanding laki-laki. Tetapi peran politik di tingkat desa menunjukkan fenomena sebaliknya. Berdasarkan sumber yang sama, dari 406 desa/kelurahan yang terdapat di kabupaten Malang, hanya terdapat 8 orang kepala desa perempuan dan 1 orang kepala kelurahan perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Ketenagakerjaan dan Pedesaan Unmer Malang (2000) juga menunjukkan betapa kecilnya peran/keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa. Ditunjukkan oleh penelitian itu, bahwa dari 10 desa sampel penelitian, yang memiliki 112 orang perangkat desa, hanya terdapat 4 orang perempuan. Tetapi menurut Karam (1999:9) persoalan perempuan dalam politik bukanlah sekedar persoalan jumlah. Yang lebih penting adalah untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas politisi perempuan.

Fenomena tersebut, jelas menunjukkan betapa peran politik perempuan sangat minimal di berbagai *level* masyarakat maupun pemerintahan. Namun hal demikian bukan berarti, bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan politik. Terdapat sisi-sisi perempuan yang apabila diimplementasikan dalam politik akan memiliki nilai-nilai yang lebih dibanding laki-laki. Seperti dikatakan Marwah Daud Ibrahim sebagaimana dikutip Kompas (6 Maret 2001) "*Kita tidak berkelahi untuk mencari solusi, tetapi berembuk, kita tidak melakukan kompetisi, tetapi kerja sama, lebih mau mendengarkan pendapat orang lain, dan hal-hal seperti itu lainnya*". Nani Nurahman seperti yang dikutip Kompas pada laporan yang sama mengemukakan hal yang senada, bahwa perempuan meng-konotasikan kekuasaan secara berbeda dengan laki-laki. Pada laki-laki, kekuasaan lebih bersifat *power over* yang berarti menguasai dan bersifat otoritatif. Pada perempuan kekuasaan lebih bersifat *power to* yang bukan atas dasar kekuatan atau legitimasi, tetapi lebih pada daya spiritual.

Penelitian yang dilakukan ini tidak hendak mempersoalkan ada atau tidaknya dan kuat atau lemahnya kemampuan politik perempuan dan kemampuan perempuan dalam jabatan publik lainnya, sehingga terdapat fenomena rendahnya peran perempuan dalam politik dan jabatan publik lainnya. Tetapi akan difokuskan pada persoalan bagaimana masyarakat menyikapi peran-peran perempuan dalam politik maupun jabatan publik lainnya. Dalam hal ini kasusnya adalah kepala desa, sebagaimana diketahui, bahwa di Kabupaten Malang terdapat 8 perempuan yang menjabat sebagai

kepala desa, yaitu masing-masing di desa Sumberporong kecamatan Lawang, desa Toyomarto kecamatan Singosari, desa Sukoanyar kecamatan Pakis, desa Kedungsalam kecamatan Donomulyo, desa Kebobang kecamatan Wonosari, dan desa Sidorahayu Kecamatan Wagir, serta dua orang lagi masing-masing di desa Sutojayan dan desa Jatisari kecamatan Pakisaji. Penelitian yang dilakukan ini hanya mengambil empat saja dari delapan obyek tersebut, yaitu : desa Sidorahayu, desa Toyomarto, desa Sutojayan, dan desa Sukoanyar.

Sedangkan permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini *pertama*, bagaimana gambaran sikap masyarakat desa di desa-desa obyek studi terhadap kepala desa perempuan yang menjabat di desanya. Permasalahan *kedua*, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap terbentuknya sikap masyarakat desa tersebut.

### **Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan permasalahan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah; *pertama*, untuk memperoleh gambaran sikap masyarakat desa di desa-desa obyek studi terhadap kepala desa perempuan yang saat ini menjabat di desanya. *Kedua*, untuk memperoleh penjelasan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap terbentuknya sikap masyarakat tersebut.

### **Manfaat Penelitian**

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sikap masyarakat %laki-laki maupun perempuan— terhadap kepemimpinan oleh perempuan di pemerintahan desa, khususnya kepala desa di desa-desa obyek studi.
2. Sekiranya gambaran masyarakat cenderung membawa akibat yang merugikan atau merendahkan martabat, dan bahkan merendahkan hak-hak politik perempuan, maka selanjutnya akan memungkinkan (memudahkan) untuk disusun program-program intervensi yang bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Perempuan dan hak-hak politik**

Dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*, dimana pemerintah Indonesia juga turut menandatangani, telah disepakati sebagaimana tercantum pada pasal 2, bahwa “negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap wanita dengan segala bentuknya, bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijakan menghapus diskriminasi terhadap wanita”. Diskriminasi terhadap perempuan seperti yang disebut pada pasal 1 konvensi tersebut, berarti setiap perbedaan, pengucilan dan pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan.

Sedangkan yang terkait dengan hak-hak politik perempuan tercantum pada pasal 7 konvensi, yang mewajibkan negara-negara membuat peraturan untuk menghapus diskriminasi perempuan dalam politik, kehidupan publik dan swasta, dan wajib menjamin wanita dalam kesederajatan dengan laki-laki hak-hak :

1. *Untuk memilih dan dipilih dalam setiap pemilihan dan referendum publik untuk pemilihan pada semua badan yang dipilih secara umum.*
2. *Untuk berpartisipasi dalam pembuatan dan implementasi kebijakan pemerintah dan memegang jabatan dalam pemerintahan serta melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat.*
3. *Untuk berorganisasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.*

Selanjutnya apa yang disebut dalam pasal 7 Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan tersebut lebih dikonkritkan dan ditegaskan dalam Konvensi Tentang hak-hak Politik Perempuan. Hak-hak politik perempuan secara tegas tercantum pada pasal 3 awal. Pasal 1 menyebutkan, bahwa perempuan berhak memberikan suara pada semua pemilihan dengan kondisi-kondisi yang sama dengan laki-laki, tanpa diskriminasi. Pada pasal 2 disebutkan, perempuan bisa dipilih untuk menduduki semua badan-badan yang dipilih secara umum, ditetapkan oleh hukum nasional, dengan kedudukan yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi. Sedangkan pada pasal 3 ditetapkan, bahwa perempuan juga bisa menduduki posisi dalam pemerintahan dan menerapkan semua fungsi-fungsi pemerintah yang ditetapkan oleh hukum nasional, dengan kedudukan yang sama dengan laki-laki, tanpa diskriminasi.

Dengan ikut menandatangani 2 konvensi di atas, maka bagi Indonesia konsekuensinya jelas, menolak perlakuan atau tindakan diskriminatif terhadap perempuan, dan wajib memberikan jaminan kepada perempuan untuk dihormati dan diberikan hak-hak politiknya.

## **2. Hak-hak politik perempuan di Indonesia**

Secara formal pemerintah Indonesia telah ikut menandatangani dua konvensi penting tentang hak-hak perempuan, yaitu Konvensi Tentang penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan dan Konvensi Tentang Hak-hak Politik Perempuan. Untuk meratifikasi kedua konvensi itu pemerintah Indonesia telah membuat dua undang-undang, yaitu UU No. 68 tahun 1956 tentang Hak-hak Politik Perempuan dan UU No. 7 Tentang pengesahan konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk diskriminasi Terhadap Perempuan. Namun implementasi kedua UU tersebut sangat bertolak belakang. Kebijakan negara tentang perempuan justru mengukuhkan ideologi jender, yang kemudian mengakibatkan partisipasi politik perempuan sangat terbatas. Negara tidak membuat kebijakan dan melakukan tindakan-tindakan khusus untuk dapat terjaminnya partisipasi politik perempuan yang merupakan aspek penting bagi terciptanya kesetaraan jender (Katjasungkana dan Hadis, ed: tanpa tahun: 54). Oleh karena itu tidaklah terlalu keliru jika Arivia (1999:2) mengatakan bahwa sistem politik seringkali memarginalkan perempuan dalam politik perempuan.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, partisipasi politik perempuan bersifat fluktuatif dan tampak mempunyai korelasi dengan corak sistem politik yang sedang berlangsung. Di masa orde lama partisipasi politik perempuan cenderung lebih bergairah, *committed* terhadap perjuangan hak-hak perempuan, dan lebih berwarna-warni. Rahayu (1996:30) mendeskripsikan dengan jelas kondisi itu, seperti dikatakannya.

*Ada yang mendirikan organisasi profesi untuk kepentingan kemajuan progesi mereka, ada pula yang melakukan semua kegiatan yang mewakili kepentingan kaum perempuan dari tingkat masa sampai elit, dan sekedar kegiatan keterampilan, bantuan sosial, melawan poligami, diskriminasi upah, sampai berpolitik ditingkat partai atau parlemen; melalui penyadaran, tulisan di media cetak, kesenian, demonstrasi, protes, sampai pengajuan usul inisiatif diparlemen.*

Setelah tampilnya rezim orde baru terjadi arus balik gerakan perempuan di Indonesia. Sejak awal orde baru gerakan perempuan dan organisasi perempuan mengalami proses domestifikasi dan kooptasi, dengan implikasi terjadi penjinakan, segregasi dan depolitisasi. Munculnya partisipasi politik perempuan lalu hanya sekedar sebagai alat untuk stabilitas politik dan ekonomi oleh pemerintah. Tampaknya aktifitas politik perempuan dan organisasi perempuan seringkali lebih disebabkan semata-mata karena mereka sebagai istri dari suami yang berkarier dan menduduki jabatan tertentu atau mereka sebagai istri para suami yang bekerja pada departemen atau badan pemerintah lainnya dan badan-badan swasta (lihat misalnya Asfar, 1996:3-16). Dengan alasan seperti ini, maka aktivitas dan keberadaan perempuan di parlemen cenderung lebih didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan *charity* (kerja sosial) ketimbang faktor-faktor *political will* (kehendak politis) di belakangnya (Arivia, 1999:5).

Masa-masa selanjutnya, dengan berlindung dan mengeksploitasi isme-isme agama, budaya, suku dan etnis, orde baru berusaha mencari justifikasi dan memperkuat ideologi (perspektif) jender yang dianutnya. Strategi komunikasi politik *state corporation* yang dibangun telah membawa akibat masyarakat terperangkap dalam ideologi jender yang dikembangkan oleh orde baru. Salah satu contoh kasus menarik adalah terkait dengan tokoh Megawati Sukarnoputri. Betapa negara (orde baru) berusaha untuk menghambat dan menjegal Megawati untuk dapat menjadi pimpinan puncak PDI (lihat Santosa, dkk, ed.:1996). Setelah orde baru runtuh dan PDI Perjuangan memenangkan pemilu 1999, langkah megawati menuju kursi kepresidenan dihambat oleh kelompok-kelompok politik yang menggunakan isu Islam, dengan mengatakan bahwa Islam melarang perempuan menjadi presiden (Sulistyo, 2000:89, baca juga Benedanto, dkk, ed.:1999).

Lalu, dunia politik seolah-olah menjadi monopoli laki-laki. Dalam kenyataan budaya dan etos politik formal sangat diwarnai oleh gaya hidup laiki-laki yang mempunyai karakter agresif serta kompetitif. Arivia (1999:3) mengemukakan politik maskulin ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek budaya patriarki dan fraternalisme. Budaya patriarki mengacu pada budaya tradisional, dimana politik dilihat sebagai hubungan patron-klien yang mengambil bentuk dari struktur bapak-anak-keluarga. Bentuk hubungan politik semacam ini mengucilkan peran perempuan dari

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuat oleh negara, sehingga persoalan-persoalan perempuan sama sekali tidak mendapatkan perhatian. Aspek fraternalisme, mengakar pada rasa persaudaraan, yang menekankan ikatan persaudaraan laki-laki yang kental dan kuat, sehidup semati, yang seringkali didorong oleh semangat seperjuangan dan feodalisme kebangsawanan.

### 3. Teori Tentang Sikap

Masalah sikap merupakan salah satu telaah di bidang sosiologi. Seiring dengan perkembangan dan percabangan ilmu, khususnya ilmu sosial yang ditandai dengan berkembangnya bidang psikologi, politik dan komunikasi lebih menmpatkan masalah sikap sebagai bahan telaah yang sangat penting. Oleh karena itu definisi tentang sikap uga sangat beragam.

Kerlinger (1990:794), seorang *behavioralis*, mendefinisikan sikap (*attitude*) sebagai:

*Ancang-ancang atau kecenderungan yang tertata untuk berfikir, merasa, mencerap dan berperilaku terhadap suatu referen atau obyek kognitif. Sikap merupakan struktur yang awet (tahan waktu) yang terdiri atas pandangan dan keyakinan, yang mencenderungkan individu untuk berperilaku selektif terhadap referen-referen sikap.*

Seorang ilmuwan politik, Lewis Froman, sebagaimana dikutip Isaak (1981:203) mengemukakan definisi sikap yang hampir sama dengan Kerlinger, seperti dikatakannya, bahwa sikap adalah,

*A predisposition of individual to evaluate some aspects of this world in favourable or unfavourable manner, that is, a predisposition to approve or disapprove, like or dislike, some social or physical object. An attitude is probably more stable and durable than opinion.*

Sedangkan Azwar (1997:4-7) membahas banyak sekali definisi dari para ahli yang berbeda pendapat dan aliran pemikiran. Salah satu definisi yang dikutipnya, yang relevan dan satu pemikiran dengan definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas adalah yang dikemukakan oleh Rensis Likert dan Charles Osgood, bahwa sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang pada sesuatu obyek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada obyek tersebut.

Sikap sangat berkaitan erat dengan opini atau nilai, bahkan ketiga istilah tersebut sering disamakan atau dipertukarkan artinya. Tetapi sebenarnya ketiga istilah tersebut tidaklah sama persis maknanya. Azwar (1997:8) menyebut opini sebagai pernyataan sikap yang spesifik atau sikap dalam artian yang lebih sempit. Opini terbentuk didasari oleh sikap yang sudah mapan, akan tetapi opini lebu bersifat situasional dan temporer. Demikian juga dengan yang dikatakan Isaak (1981:203), bahwa,

*An opinion as an implicit verbal response or 'answer' that an individual gives in response to particular stimulus situation in which some general 'question' is raised. An opinion is usually distinguished from an attitude*

*on the basis of generality. That is, an opinion has to do with a specific issue.*

Nilai menurut Azwar selanjutnya, merupakan disposisi yang lebih luas dan sifatnya lebih mendasar. Nilai berakar lebih dalam dan karenanya lebih stabil dibandingkan sikap individu. Lebih dari itu nilai dianggap sebagai bagian dari individu yang dapat mewarnai kepribadian kelompok atau kepribadian bangsa. Secara lebih praktis Isaak (1981:204) dengan mengutip Froman mengemukakan "*a value is statement of 'good' or 'bad', 'right' or 'wrong', something which is desired or though desirable*".

Ilmuwan politik memandang nilai politik (*political value*) sebagai sangat penting untuk menjelaskan perilaku politik (*political behavior*). Lasswell (1995:74-77) mengidentifikasi sejumlah nilai yang menjakajian dalam ilmu politik, yaitu: power, wealth, well-being, enlightenment, affection, rectitude, and respect. Jadi jelas disini, nilai bersifat lebih mendasar dan stabil sebagai bagian dari ciri kepribadian, sikap bersifat evaluatif dan berakar pada nilai yang dianut yang terbentuk dalam kaitannya dengan suatu obyek, sedangkan opini merupakan sikap yang lebih spesifik dan sangat situasional serta lebih mudah berubah.

Azwar (1997:24-28) mengutip Kohandhapani, menyebutkan bahwa sikap memiliki tiga komponen, yaitu komponen kognitif, afektif dan komponen perilaku. Sedangkan sbagaimana sikap itu terbentuk, adalah interaksi sosial yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media masa, institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosi dalam diri individu.

## METODE PENELITIAN

### 1. Hipotesis

Hipotesis ini khususnya ditujukan untuk tujuan penelitian kedua, yang berusaha menemukan penjelasan ada atau tidak pengaruh antara variabel-variabel yang diduga membentuk sikap masyarakat dengan dukungan yang diberikan kepada kepala desa perempuan.

**Hipotesis nol ( $H_0$ )** : tidak ada pengaruh antara variabel-variabel pembentuk sikap ( $X_1 - X_7$ ) sebagai variabel bebas dengan variabel dukungan kepada kepala desa perempuan ( $Y$ ) sebagai variabel terikat.

**Hipotesis kerja ( $H_i$ )** : ada pengaruh antara variabel-variabel pembentuk sikap ( $X_1 - X_7$ ) sebagai variabel bebas dengan variabel dukungan kepada kepala desa perempuan ( $Y$ ) sebagai variabel terikat.

### 2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada empat desa di kabupaten Malang ini adalah merupakan penelitian deskriptif sekaligus eksplanatori dengan pendekatan *survey*. Penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran bagaimana dukungan masyarakat

kepada kepala desa perempuan, dan penelitian eksplanatori untuk memperoleh penjelasan hubungan pengaruh antara variabel pembentuk sikap (X) dengan variabel sikap dukungan kepada kepala desa (Y).

### 3. Variabel Penelitian

Penelitian difokuskan pada hal-hal berikut; *pertama*, bagaimana sikap masyarakat di desa-desa obyek studi terhadap perempuan yang pada periode ini tengah menjabat sebagai kepala desa. Variabel ini dilihat dengan menggunakan empat kriteria sikap: *sangat tidak mendukung, tidak mendukung, mendukung dan sangat mendukung* yang diterapkan pada saat proses pemilihan, pada saat ini dengan melihat kinerja kepala desa, dan pada masa mendatang bila kepala desa mencalonkan diri lagi pada pemilihan berikutnya. *Kedua*, faktor atau variable apa saja yang diduga berpengaruh terhadap terbentuknya sikap masyarakat tersebut. Dalam hal ini terdapat 7 (tujuh) variabel yang diduga sebagai pembentuk sikap masyarakat, yaitu: variabel kemampuan kepala desa perempuan (X1); variabel panutan (X2); variabel imbalan (*money politics*) (X3); variabel akses media massa (X4); variabel pendidikan (X5); variabel agama (X6); dan variabel budaya masyarakat (X7).

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi mencakup seluruh anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di desa-desa obyek studi, yaitu 8 desa yang kepala desanya perempuan. Sedang sampel desa ditentukan 4 desa secara *purposive*, atas pertimbangan bahwa di empat desa itu kepala desa sudah terpilih sejak sebelum Badan Perwakilan Desa (BPD) di desa-desa itu terbentuk. Keempat desa itu adalah desa Toyomarto di Kecamatan Singosari, desa Sukoanyar di Kecamatan Pakis, desa Sutojayan di Kecamatan Pakisaji, dan desa Sidorahayu di Kecamatan Wagir. Mengingat jumlah seluruh anggota BPD di desa-desa obyek studi hanya 64 orang, maka seluruhnya dijadikan sampel (*total sample*) penelitian.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Dengan teknik ini responden diminta memberikan jawaban dengan cara memilih salah satu dari empat kategori pilihan jawaban.

### 6. Metode Analisa Data

Untuk menganalisa sikap masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa perempuan, digunakan statistik deskriptif yang kemudian diinterpretasikan secara kualitatif dengan menggunakan patokan ukur sebagai berikut. Apabila diperoleh skor 1,00 – 1,74, berarti menunjukkan *dukungan yang sangat rendah*; skor 1,75 – 2,49, menunjukkan *dukungan rendah*; 2,50 – 3,24 menunjukkan *dukungan tinggi*; dan skor 3,25 – 4,00 menunjukkan *dukungan sangat tinggi*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa*



perempuan serta faktor-faktor apa yang melatar-belakangi terbentuknya pemahaman tersebut. Pada analisis ini dipergunakan statistik deskriptif yang kemudian diinterpretasikan secara kualitatif.

### **Deskripsi Data Responden**

Berikut ini disajikan deskripsi data responden yang dilibatkan langsung dalam penelitian sebanyak 64 orang. Data responden meliputi indikator; usia responden, jenis kelamin, agama yang dianut, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan organisasi yang diikuti.

#### **1. Usia Responden**

Distribusi responden berdasarkan usia yang diklasifikasikan dalam empat tingkatan usia. Responden sebagian besar berusia antara 26 – 45 tahun yaitu sebanyak 56 orang (87,50 %) dan 8 orang berusia antara 46 – 65 tahun (12,50 %).

#### **2. Jenis Kelamin**

Diidentifikasi bahwa 55 orang (85,94 %) responden berjenis kelamin laki-laki, dan 9 orang (14,06 %) responden berjenis kelamin perempuan.

#### **3. Agama yang Dianut**

Sebaran distribusi responden berdasarkan agama yang dianut sebagai berikut; 60 orang (93,75 %) beragama Islam, 2 orang (3,13 %) beragama Kristen, 1 orang (1,56 %) beragama Karholik dan 1 orang (1,56 %) menyatakan sebagai penganut kepercayaan. Disimpulkan bahwa mayoritas responden beragama Islam.

#### **4. Tingkat Pendidikan**

Berdasarkan tingkat pendidikan yang pernah ditempuh, distribusi responden tersebar sebagai berikut; 20 orang (31,25 %) pada jenjang sekolah lanjutan pertama, 20 orang (31,25 %) berpendidikan setingkat SLTA, dan 24 orang (37,50 %) berpendidikan setingkat perguruan tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh responden pernah menempuh pendidikan formal dan sebagian besar responden berpendidikan setingkat perguruan tinggi.

#### **5. Jenis Pekerjaan**

Distribusi responden berdasarkan jenis pekerjaan yang mereka jalankan selama ini. Data tersebar sebagai berikut; sebanyak 8 orang (12,50 %) adalah petani, 4 orang (6,25 %) bekerja sebagai buruh tani, 12 orang (18,75 %) bermata-pencaharian sebagai pedagang/ wiraswasta, 12 orang (18,75 %) bekerja sebagai guru, 5 orang (7,81 %) memiliki pekerjaan sebagai PNS selain guru, 4 orang (6,25 %) bekerja sebagai anggota TNI/Polri, dan 19 orang (29,69 %) bekerja sebagai karyawan swasta.

#### **6. Organisasi yang Diikuti**

Distribusi responden berdasarkan organisasi yang diikuti tersebar sebagai berikut; 24 orang (37,50 %) menyatakan mengikuti organisasi sosial keagamaan, 13 orang (20,31 %) mengikuti organisasi sosial kepemudaan, 5 orang (7,81 %) berasal dari organisasi politik kepemudaan, 15 orang (23,44 %) mengikuti partai politik dan 7 orang (10,94 %) responden mengaku tidak mengikuti organisasi apapun.

### Deskripsi Variabel Sikap Masyarakat Desa terhadap Kepala Desa Perempuan (Variabel Y)

Jawaban responden tentang *dukungan pada saat pemilihan kepala desa yang lalu* terdistribusi sebagai berikut; 1 orang (1,56%) menyatakan *sangat tidak mendukung*; 19 orang (29,69%) menyatakan *tidak mendukung*, 21 orang (32,81 %) menyatakan *mendukung*, dan 23 orang (35,94 %) menyatakan *sangat mendukung* terpilihnya kepala desa perempuan pada saat pemilihan yang lalu. Dukungan responden terhadap kepala desa pada periode sekarang terdistribusi sebagai berikut; 3 orang (4,69 %) menyatakan *sangat tidak mendukung*; 4 orang (6,25 %) menyatakan *tidak mendukung*, 35 orang (54,69 %) menyatakan *mendukung*, dan 22 orang (34,37%) menyatakan *sangat mendukung* kepemimpinan kepala desa perempuan.

Jawaban responden tentang *dukungan untuk pemilihan kepala desa periode mendatang* terdistribusi sebagai berikut; 12 orang (18,75 %) menyatakan *sangat tidak mendukung*, 21 orang (32,81 %) menyatakan *tidak mendukung*; 16 orang (25,00 %) menyatakan *mendukung*, dan 15 orang (23,44 %) menyatakan *sangat mendukung* terpilihnya kepala desa perempuan pada pemilihan periode mendatang. Total skor adalah sebesar 560 dan rata-rata skor sebesar 2,92.

### Deskripsi Variabel Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap Masyarakat Desa terhadap Kepala Desa Perempuan

Dalam hal ini yang ingin diketahui dari responden adalah hal-hal yang mempengaruhi sikap masyarakat desa atas dukungan mereka pada kepala desa perempuan yang saat ini menjabat di desa-desa obyek studi. Indikator-indikator penelitian diukur melalui empat skala ukur sebagai berikut; untuk jawaban (a) *sangat tidak setuju* diberikan skor 1; (b) *tidak setuju* diberikan skor 2; (c) *setuju* diberikan skor 3; dan (d) *sangat setuju* diberikan skor 4.

#### Faktor Kemampuan Kepala Desa Perempuan ( $X_1$ )

Persepsi responden tentang apakah *kepala desa memiliki pengetahuan dan pengalaman memimpin*, jawabannya terdistribusi sebagai berikut; 4 orang (6,25 %) menyatakan *sangat tidak setuju*, 12 orang (18,75 %) menyatakan *tidak setuju*, 24 orang (37,50 %) menyatakan *setuju* dan 24 orang (37,50 %) menyatakan *sangat setuju*.

Persepsi responden tentang apakah *kepala desa dapat melaksanakan tugasnya dengan baik* terdistribusi sebagai berikut; 24 orang (37,50 %) menyatakan *tidak setuju*, 28 orang (43,75 %) menyatakan *setuju* dan 12 orang (18,75 %) menyatakan *sangat setuju*.

Jawaban responden tentang pernyataan *bahwa Jabatan Kepala Desa Bukan Monopoli kaum Laki-Laki* terdistribusi sebagai berikut; 44 orang (68,75 %) menyatakan *setuju* dan 20 orang (31,25 %) menyatakan *sangat setuju*. Adapun total keseluruhan skor adalah sebesar 588 dan rata-rata skor sebesar 3,06

### **Faktor Panutan (X<sub>2</sub>)**

Persepsi responden terhadap kepala desa perempuan bahwa *Persepsi tentang Peran Perempuan Ditentukan oleh Pendapat Panutan*, jawabannya terdistribusi sebagai berikut; 4 orang (6,25 %) menyatakan *sangat tidak setuju*, 40 orang (62,50 %) menyatakan *tidak setuju*, 16 orang (25,0 %) menyatakan *setuju* dan 4 orang (6,25 %) menyatakan *sangat setuju*. Total skor sebesar 148 dan rata-rata skor sebesar 2,31.

### **Faktor Imbalan/Money Politics (X<sub>3</sub>)**

Persepsi responden terhadap kepala desa perempuan bahwa *Memilih atau Mendukung Calon Kepala Desa Karena Motif Imbalan*, jawabannya terdistribusi sebagai berikut; 15 orang (23,44 %) menyatakan *sangat tidak setuju*, 21 orang (32,81 %) menyatakan *tidak setuju*, 17 orang (26,56 %) menyatakan *setuju* dan 11 orang (17,19 %) menyatakan *sangat setuju*. Total skor sebesar 152 dan rata-rata skor sebesar 2,38.

### **Faktor Akses Media Massa (X<sub>4</sub>)**

Jawaban responden tentang *Peran Media Massa dalam Upaya Pemahaman Atas Persamaan Hak politik antara Laki-Laki dan Perempuan* terdistribusi sebagai berikut; 2 orang (3,12 %) menyatakan *sangat tidak setuju*; 3 orang (4,69 %) menyatakan *tidak setuju*, 43 orang (67,19 %) menyatakan *setuju*, dan 16 orang (25,00 %) menyatakan *sangat setuju*. Jawaban responden tentang *Peran Media Massa dalam Upaya Pemahaman Atas Persamaan Hak antara Laki-Laki dan Perempuan untuk Dipilih dan Memilih* terdistribusi sebagai berikut; 2 orang (3,12 %) menyatakan *sangat tidak setuju*; 2 orang (3,12 %) menyatakan *tidak setuju*; 39 orang (60,94 %) menyatakan *setuju*, dan 21 orang (32,82 %) menyatakan *sangat setuju*. Adapun total keseluruhan skor adalah sebesar 408 dan rata-rata skor sebesar 3,19.

### **Faktor Pendidikan (X<sub>5</sub>)**

Persepsi responden tentang apakah *Latar Belakang Pendidikan Menentukan Pemahaman tentang Persamaan Hak Politik antara Laki-Laki dan Perempuan*, jawabannya terdistribusi sebagai berikut; 7 orang (10,94 %) menyatakan *sangat tidak setuju*, 21 orang (32,81 %) menyatakan *tidak setuju*, 27 orang (42,19 %) menyatakan *setuju*, dan 9 orang (14,06 %) menyatakan *sangat setuju*.

Persepsi responden tentang *Latar Belakang Pendidikan Menentukan Pilihan (Memilih atau Tidak Memilih) Kepala Desa Perempuan*, jawabannya terdistribusi sebagai berikut; 1 orang (1,56 %) menyatakan *sangat tidak setuju*; 36 orang (56,25 %) menyatakan *tidak setuju*, 23 orang (35,94 %) menyatakan *setuju*, dan 4 orang (6,25 %) menyatakan *sangat setuju*. Adapun total keseluruhan skor adalah sebesar 324 dan rata-rata skor sebesar 2,53.

### **Faktor Agama (X<sub>6</sub>)**

Persepsi responden apakah *Menurut Ajaran Agama Laki-Laki dan Perempuan Tidak Ada Bedanya dalam Kehidupan di Dunia maupun Di Hadapan Tuhan*,

jawabannya terdistribusi sebagai berikut; 1 orang (1,56 %) menyatakan *sangat tidak setuju*; 4 orang (6,25 %) menyatakan *tidak setuju*; 35 orang (54,69 %) menyatakan *setuju*, dan 24 orang (37,50 %) menyatakan *sangat setuju*. Persepsi responden bahwa *Ajaran Agama yang Dianut Seseorang Menentukan Pilihan (Memilih atau Tidak Memilih) Kepala Desa Perempuan*. Jawaban responden terdistribusi sebagai berikut; 3 orang (4,69 %) menyatakan *sangat tidak setuju*, 16 orang (25,00 %) menyatakan *tidak setuju*, 29 orang (45,31 %) menyatakan *setuju*, dan 16 orang (25,00 %) menyatakan *sangat setuju*.

Adapun total keseluruhan skor adalah sebesar 396 dan rata-rata skor sebesar 3,09.

### **Faktor Budaya Masyarakat ( $X_7$ )**

Persepsi responden tentang *Posisi Perempuan yang Secara Politis Selalu Di Bawah laki-Laki*. Jawaban responden terdistribusi sebagai berikut; 4 orang (6,25 %) menyatakan *sangat tidak setuju*, 28 orang (43,75 %) menyatakan *tidak setuju*, 19 orang (29,69 %) menyatakan *setuju*, dan 13 orang (20,31 %) menyatakan *sangat setuju*.

Persepsi responden tentang apakah *Memilih Kepala Desa Perempuan Karena Peran Keperempuanannya*. Jawaban responden terdistribusi sebagai berikut; 5 orang (7,81 %) menyatakan *sangat tidak setuju*, 36 orang (56,25 %) menyatakan *tidak setuju*, 16 orang (25,00 %) menyatakan *setuju*, dan 7 orang (10,94 %) menyatakan *sangat setuju*.

Persepsi responden tentang *peran perempuan bukan sekedar "kanca wingking"*. Jawaban responden terdistribusi sebagai berikut; 9 orang (14,06 %) menyatakan *sangat tidak setuju*, 14 orang (21,88 %) menyatakan *tidak setuju*, 31 orang (48,43 %) menyatakan *setuju* dan 10 orang (15,63 %) menyatakan *sangat setuju*. Total keseluruhan skor adalah sebesar 492 dan rata-rata skor sebesar 2,56.

### **Analisis Korelasi dan Regresi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap Masyarakat terhadap Kepala Desa Perempuan**

Selanjutnya dilakukan analisis korelasi dan regresi atas variabel-variabel yang diteliti, antara lain; Faktor Kemampuan Kepala Desa Perempuan ( $X_1$ ), Faktor Panutan ( $X_2$ ), Faktor Imbalan/*Money Politics* ( $X_3$ ), Faktor Akses Media Massa ( $X_4$ ), Faktor Pendidikan ( $X_5$ ), Faktor Agama ( $X_6$ ) dan Faktor Budaya Masyarakat ( $X_7$ )

Sebaran keseluruhan data yang dikorelasikan dapat dilihat pada lampiran. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan *Statistical Program for Social Sciences* (SPSS), maka dapat diketahui bahwa :

1. Koefisien Korelasi Berganda (R) sebesar 0,752 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel bebas ( $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$ , dan  $X_7$ ) dengan variabel terikat (Y). Koefisien regresi berganda ( $R^2$ ) sebesar 0,184 mengindikasikan pengaruh secara bersama-sama variabel bebas ( $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$ , dan  $X_7$ ) terhadap variabel terikat (Y). Perubahan pada variabel terikat 18,4 % dapat dijelaskan oleh variabel bebas Y.

2. Konstanta = 3,0075 artinya bahwa jika variabel bebas sama dengan nol maka nilai Y adalah 3,075 satuan.
3. Koefisien korelasi parsial  $r_1 = 0,566$  menunjukkan bahwa Variabel  $X_1$  berhubungan kuat dengan Y. Koefisien regresi parsial ( $b_1$ ) = 0,797 menunjukkan pengaruh  $X_1$  terhadap Y, di mana peningkatan 1 satuan  $X_1$  akan diikuti peningkatan Y sebesar 0,797 satuan.
4. Koefisien korelasi parsial  $r_2 = 0,354$  menunjukkan bahwa hubungan Variabel  $X_2$  dengan Y adalah lemah. Koefisien regresi parsial ( $b_2$ ) = 0,440 menunjukkan pengaruh  $X_2$  terhadap Y, di mana peningkatan 1 satuan  $X_2$  akan diikuti peningkatan Y sebesar 0,440 satuan.
5. Koefisien korelasi parsial  $r_3 = 0,208$  menunjukkan bahwa Variabel  $X_3$  berhubungan lemah dengan Y. Koefisien regresi parsial ( $b_3$ ) = 0,165 menunjukkan pengaruh  $X_3$  terhadap Y, di mana peningkatan 1 satuan  $X_3$  akan diikuti peningkatan Y sebesar 0,165 satuan.
6. Koefisien korelasi parsial  $r_4 = -0,437$  menunjukkan bahwa hubungan Variabel  $X_4$  dengan Y adalah lemah dan arahnya negatif. Koefisien regresi parsial ( $b_4$ ) = -0,691 menunjukkan pengaruh  $X_4$  terhadap Y, di mana peningkatan 1 satuan  $X_4$  akan diikuti penurunan Y sebesar 0,691 satuan.
7. Koefisien korelasi parsial  $r_5 = 0,083$  menunjukkan bahwa hubungan Variabel  $X_5$  dengan Y adalah sangat lemah. Koefisien regresi parsial ( $b_5$ ) = 0,124 menunjukkan pengaruh  $X_5$  terhadap Y, di mana peningkatan 1 satuan  $X_5$  akan diikuti peningkatan Y sebesar 0,124 satuan.
8. Koefisien korelasi parsial  $r_6 = -0,320$  menunjukkan bahwa hubungan Variabel  $X_6$  dengan Y cukup lemah dan arahnya negatif. Koefisien regresi parsial ( $b_6$ ) = -0,484 menunjukkan pengaruh  $X_6$  terhadap Y, di mana peningkatan 1 satuan  $X_6$  akan diikuti penurunan Y sebesar 0,484 satuan.
9. Koefisien korelasi parsial  $r_7 = -0,152$  menunjukkan bahwa hubungan Variabel  $X_7$  dengan Y adalah sangat lemah dan arahnya negatif. Koefisien regresi parsial ( $b_7$ ) = -0,182 menunjukkan pengaruh  $X_7$  terhadap Y, di mana peningkatan 1 satuan  $X_7$  akan diikuti penurunan Y sebesar 0,182 satuan.

## SIMPULAN

**Karakteristik responden yang mewakili anggota BPD pada desa-desa obyek studi di Kabupaten Malang digambarkan sebagai berikut :**

Bahwa, responden sebagian besar (87,50 %) berusia antara 26 – 45 tahun; responden didominasi oleh laki-laki (85,94 %); responden mayoritas beragama Islam (93,75 %); responden sebagian besar telah mengenyam pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi (37,5 %); responden sebagian besar bekerja sebagai karyawan swasta (29,69 %); responden sebagian besar adalah aktifis pada organisasi sosial keagamaan (37,50 %)

Analisis deskriptif variabel-variabel yang diteliti menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. *Deskripsi Variabel Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap Masyarakat*

*Desa terhadap Kepala Desa Perempuan*

- a. Faktor Kemampuan Kepala Desa Perempuan ( $X_1$ )  
Total skor sebesar 588 dan rata-rata skor sebesar 3,06
- b. Faktor Tokoh Panutan ( $X_2$ )  
Total skor sebesar 148 dan rata-rata skor sebesar 2,31
- c. Faktor Imbalan/*Money Politics* ( $X_3$ )  
Total skor sebesar 152 dan rata-rata skor sebesar 2,38
- d. Faktor Akses Media Massa ( $X_4$ )  
Adapun total keseluruhan skor adalah sebesar 408 dan rata-rata skor sebesar 3,19
- e. Faktor Pendidikan ( $X_5$ )  
Adapun total keseluruhan skor adalah sebesar 324 dan rata-rata skor sebesar 2,53
- f. Faktor Agama ( $X_6$ )  
Adapun total keseluruhan skor adalah sebesar 396 dan rata-rata skor sebesar 3,09
- g. Faktor Budaya Masyarakat ( $X_7$ )  
Total skor adalah sebesar 492 dan rata-rata skor sebesar 2,56

2. *Deskripsi Variabel Sikap Masyarakat Desa terhadap Kepala Desa Perempuan*

Total skor adalah sebesar 560 dan rata-rata skor sebesar 2,92

Pengaruh faktor-faktor yang melatar-belakangi sikap masyarakat terhadap kepala desa perempuan adalah sebagai berikut :

1. Koefisien Korelasi Berganda ( $R$ ) sebesar 0,752 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel bebas ( $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6,$  dan  $X_7$ ) dengan variabel terikat ( $Y$ ). Koefisien regresi berganda ( $R^2$ ) sebesar 0,184 mengindikasikan pengaruh secara bersama-sama variabel bebas ( $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6,$  dan  $X_7$ ) terhadap variabel terikat ( $Y$ ). Perubahan pada variabel terikat 18,4% dapat dijelaskan oleh variabel bebas  $Y$ . Dengan demikian, maka hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis kerja ( $H_1$ ) diterima.
2. Konstanta = 3,0075 artinya bahwa jika variabel bebas sama dengan nol maka nilai  $Y$  adalah 3,075 satuan.
3. Koefisien korelasi parsial  $r_1 = 0,566$  menunjukkan bahwa Variabel  $X_1$  berhubungan kuat dengan  $Y$ . Koefisien regresi parsial ( $b_1$ ) = 0,797 menunjukkan pengaruh  $X_1$  terhadap  $Y$ , di mana peningkatan 1 satuan  $X_1$  akan diikuti peningkatan  $Y$  sebesar 0,797 satuan.
4. Koefisien korelasi parsial  $r_2 = 0,354$  menunjukkan bahwa hubungan Variabel  $X_2$  dengan  $Y$  adalah lemah. Koefisien regresi parsial ( $b_2$ ) = 0,440 menunjukkan pengaruh  $X_2$  terhadap  $Y$ , di mana peningkatan 1 satuan  $X_2$  akan diikuti peningkatan  $Y$  sebesar 0,440 satuan.
5. Koefisien korelasi parsial  $r_3 = 0,208$  menunjukkan bahwa Variabel  $X_3$  berhubungan lemah dengan  $Y$ . Koefisien regresi parsial ( $b_3$ ) = 0,165 menunjukkan pengaruh  $X_3$

- terhadap Y, di mana peningkatan 1 satuan  $X_3$  akan diikuti peningkatan Y sebesar 0,165 satuan.
6. Koefisien korelasi parsial  $r_4 = -0,437$  menunjukkan bahwa hubungan Variabel  $X_4$  dengan Y adalah lemah dan arahnya negatif. Koefisien regresi parsial  $(b_4) = -0,691$  menunjukkan pengaruh  $X_4$  terhadap Y, di mana peningkatan 1 satuan  $X_4$  akan diikuti penurunan Y sebesar 0,691 satuan.
  7. Koefisien korelasi parsial  $r_5 = 0,083$  menunjukkan bahwa hubungan Variabel  $X_5$  dengan Y adalah sangat lemah. Koefisien regresi parsial  $(b_5) = 0,124$  menunjukkan pengaruh  $X_5$  terhadap Y, di mana peningkatan 1 satuan  $X_5$  akan diikuti peningkatan Y sebesar 0,124 satuan.
  8. Koefisien korelasi parsial  $r_6 = -0,320$  menunjukkan bahwa hubungan Variabel  $X_6$  dengan Y cukup lemah dan arahnya negatif. Koefisien regresi parsial  $(b_6) = -0,484$  menunjukkan pengaruh  $X_6$  terhadap Y, di mana peningkatan 1 satuan  $X_6$  akan diikuti penurunan Y sebesar 0,484 satuan.
  9. Koefisien korelasi parsial  $r_7 = -0,152$  menunjukkan bahwa hubungan Variabel  $X_7$  dengan Y adalah sangat lemah dan arahnya negatif. Koefisien regresi parsial  $(b_7) = -0,182$  menunjukkan pengaruh  $X_7$  terhadap Y, di mana peningkatan 1 satuan  $X_7$  akan diikuti penurunan Y sebesar 0,182 satuan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arivia, Gadis, 1999, Perempuan di Parlemen: Bukan sekedar Jumlah, Bukan sekedar Hiasan, dalam Subono, Nur Iman, *Aspirasi Perempuan Anggota Parlemen Terhadap Pemberdayaan Politik Perempuan*, Jakarta, penerbit yayasan jurnal Perempuan.
- Asfar, Muhammad, 1996, *Wanita dan Politik Antara Karir Pribadi dan Jabatan Suami*, dalam Prisma, No. 5, Th XXV, Mei
- Aswar, Saifudin, 1997, *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 1999, *Kabupaten Malang Dalam Angka 1999*.
- Benedanto, Pax, Eds., 1999, Pemilihan Umum 1999: *Demokrasi Atau Rebutan Kursi*, Jakarta, Lembaga Studi Pers dan pembangunan (LSPP).
- Isaak, Alan, C., 1981, *Scope And Methods of Political Science, An Introduction to The Methodology of Political Inquiry*, 3<sup>rd</sup> edition, Homewood, The Dorsey Press.
- Karam, Azza, 1999, Pendahuluan: Gender dan demokrasi—Mengapa?, dalam Karam, Azza, dkk., *Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*, Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan.
- Katjasungkana, Nursjahbani, dan Hadiz, Lisa tanpa tahun, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Kaum Perempuan*, Penerbit Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan.
- Kerlinger, Fred, N., 1990, *Azas-azas Penelitian Behavioral*, terjemahan, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

*Kompas*, 6 Maret 2001

*Kompas*, 27 Januari 2001

Lasswell, Harold, 1951, *Psychopathology and Politics in the Political Writings of Harold D. Lasswell*, Glencoe, The Free Press.

Pusat Penelitian Ketenagakerjaan dan Pedesaan Unmer Malang, 2000, *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparat desa, Studi Evaluatif di Kabupaten Malang*.

Rahayu, Ruth Indah, 1999, *Politik Gender Orde Baru, Tinjauan Organisasi Perempuan Sejak 1980-an*, dalam Prisma, No. 5, Th. XXV, Mei.

Santosa, dkk, 1996, *Megawati Sukarnoputri Pantang Surut Langkah*, Jakarta, Penerbit ISAI.

Sekretariat APIK dan Forum, 1996, *Konvensi Tentang Hak-hak Politik Perempuan*.  
Sulistyo, Hermawan, 2000, *Megawati dan Kepemimpinan Perempuan dalam Politik*,

*Kompas*, 28 Juni

United nation, 1981, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*.